

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PROGRAM ADIWIYATA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)1 SINGKEP

Nazreen Banu¹, Rudi Subiyakto², Agus Hendrayady³
nazreenbanu1231@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji,

Abstract

This research is motivated by the absence of a mutual agreement between the Minister of State for the Environment with the Minister of National Education, Number: 03/minister of environment/02/2010 and Number: 01/II/KB/2010 to develop a program Adiwiyata. Senior High School (sman) 1 Singkep is one of the schools that earned the award as the Adiwiyata school. Adiwiyata school is a school that is environmentally clean and healthy. This study aims to evaluate the implementation of Environmental Education Policy in the Adiwiyata Program in SMA Negeri 1 Singkep. Theory that used in this research is the theory of policy evaluation William N Dunn. The research method used in this research is qualitative with descriptive research type. Data collection techniques in this research is by observation, interview, and documentation. Data analysis techniques, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the implementation of Environmental Education in the Adiwiyata Program in high School (SMAN)1 Singkep is not running properly dilihat of the indicator. (1) Indicators of Effectiveness, the implementation does not work effectively due to its implementation does not meet the standards of the policies that have been defined. (2) Indicators of Efficiency, its implementation is not efficient due to constrained by the absence of the budget and the help from the government. (3) the Adequacy, implementation still experiencing problems due less to understand their respective duties in carrying out the Educational Environment so that the results of the implementation has not been enough in its accomplishment. (4) Equity, in its implementation is still not evenly distributed in the implementation of the program. (5) Responsiveness, the results showed that the response from the user policy has yet to show the form of participation, so that the implementation is relatively low. (6) Accuracy, from the results of research that the implementation of Environmental Education In the Adiwiyata Program is right on target in its implementation. Conclusion in this study is, preformance carry out the evaluation of the policy found that the implementation of the policy has not run with the maximum and still many obstacles in applying it. Suggestions from this study that there is need for better cooperation from the relevant authorities and Schools for the implementation of Environmental Education In the Program Adiwiyara in SMAN 1 Singkep goes well.

Keywords : Policy Evaluation, Environmental Education, Adiwiyata Program

A. PENDAHULUAN

Kedaaan yang terjadi pada lingkungan di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Dengan bertambah pesatnya pembangunan di Indonesia telah banyak menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Kegiatan

pembangunan juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas pada lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan terjadinya degradasi lingkungan (Budi Ramadhani, 2014).

Bencana alam di Indonesia sangat sering terjadi, salah satunya yaitu pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut James A. Nash menjelaskan bahwa alam memiliki hak asasi alam yaitu yang terdapat pada konsep untuk bertahan hidup dan cenderung harus dijaga dan dilestarikan karena kehidupan kebutuhan organisme hidup sangat bergantung pada kebutuhan benda-benda abiotis (A. Sonny Kerf :108- 109). Seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan yang terjadi, menjadi hal penting bagi setiap manusia untuk menerapkan gaya hidup cinta lingkungan serta menanamkan pendidikan karakter. Dalam upaya pengelolaan lingkungan, karakter yang harus tertanam pada individu adalah karakter peduli lingkungan.

Menindaklanjuti permasalahan tentang peduli lingkungan, sesuai dengan permasalahan di atas maka perlu adanya pendidikan lingkungan hidup sejak dini, salah satunya menerapkannya di sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberi dan mengajarkan pemberitahuan serta ilmu tentang pentingnya lingkungan hidup. Dalam menghadapi permasalahan ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional membuat suatu kesepakatan tentang program adiwiyata pada Nomor: 03/MENLH/02/2010 dan Nomor: 01/11/KB/2010 (Nurhayati, 2016). Kemudian ditetapkanlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Peraturan ini dibuat agar mempermudah pelaksana kebijakan menjalankan atau melaksanakan program adiwiyata dengan mudah dan terarah dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan kebijakan diatas, tentunya pemerintah mengharapkan adanya pendidikan yang membentuk karakter peduli lingkungan dalam program adiwiyata. Adiwiyata yaitu sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, peserta didik, dan pekerja lainnya), untuk mendorong upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sekolah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata merupakan sekolah yang dianggap berhasil dalam membentuk karakter pendidikan peduli lingkungan. Program ini berlangsung dengan melibatkan sekolah–sekolah yang peduli lingkungan di Kepulauan Riau salah satunya sekolah yang ada di Kabupaten Lingga salah satu sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan adiwiyata di Kabupaten Lingga adalah SMA Negeri 1 Singkep merupakan sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata.

Dalam melaksanakan program adiwiyata sekolah harus memiliki dan memenuhi kriteria

adhiyaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan adhiyaya yaitu dapat dilihat dari aspek kebijakan sekolah yang mempunyai wawasan lingkungan hidup, aspek kurikulum sekolah yang memiliki basis lingkungan hidup, aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan, dan aspek kegiatan lingkungan sekolah berbasis partisipatif.

Keberhasilan SMA Negeri 1 Singkep mendapatkan Predikat sebagai sekolah adhiyaya seakan hanya sebagai formalitas saja, dimana setelah ditetapkan menjadi sekolah adhiyaya, sekolah ini tidak lagi berfokus pada penerapan peduli lingkungan melainkan pada pembangunan infrastruktur sekolah. Penerapan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program adhiyaya di SMA Negeri 1 Singkep ini masih menimbulkan masalah dikarenakan hasil dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup melalui program adhiyaya ini masih tergolong rendah, pelaksanaan program juga belum dipersiapkan sesuai kebutuhan kegiatan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya, kurangnya *implementor* yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup melalui program adhiyaya sehingga membuat proses implementasinya berjalan namun tidak efektif dan efisien, dan kemudian rendahnya penyediaan dana dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup lewat program adhiyaya. Selain masalah yang juga terjadi dalam pelaksanaan program adhiyaya di SMA Negeri 1 Singkep adalah kurangnya kerjasama antar pemberi kebijakan dan pelaksana kebijakan yang masih belum optimal, dan belum berjalan secara efektif dan efisien, sehingga perlu adanya perbaikan atau melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan program adhiyaya di SMA Negeri 1 Singkep tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana evaluasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adhiyaya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1 Singkep?** Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup dalam program adhiyaya di SMA Negeri 1 Singkep sudah berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak.

B. KERANGKA TEORI

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharno, 2005: 136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka, Evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan

penilaian (*assessment*). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

- 1) Fokus Nilai. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interdependensi Fakta – Nilai. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakantindakan yang telah dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*ex-ante*).
- 4) Kualitas Nilai. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain) (Miftahudin, 2009).

Evaluasi Kebijakan menurut Muhadjir dalam (Widodo, 2008) yang dikutip oleh (Muhammad Firyal Akbar) yang evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan anantara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang di tentukan.

Bigham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- a. Evaluasi Administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintahan yang berkenaan dengan:
 - a) *Effort evaluation*, menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan;
 - b) *Performancrmance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan;
 - c) *Edequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan;
 - d) *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut;
 - e) *Process evaluation*, yang menilai metode yang digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
- b. Evaluasi *judicial*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan di implementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstistusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selain itu dalam penyelenggaraan lingkungan tentunya perlunya konsep dalam penyelenggaraan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintah yang bisa dicapai dan diwujudkan. Paradigm penyelenggaraan pemerintah yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. (A.Sonny Kerap :2010).

Tujuan umum pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO dalam konferensi Tbilisi (1997) adalah:

1. Untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan;

2. Untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, dan
3. Untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek:
 - 1) Pengetahuan;
 - 2) Sikap;
 - 3) Kepedulian;
 - 4) Keterampilan; dan
 - 5) Partisipasi.

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 65 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari UU di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali berhak atas pendidikan lingkungan hidup beserta akses informasi akses partisipasi, maupun akses keadilan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Program Adiwiyata

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti sekolah adiwiyata diupayakan menjadi sekolah atau tempat bagi warga sekolah untuk memperoleh pengetahuan, norma, dan etika sebagai dasar menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009: 1): tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata mengenai pengembangan kebijakan sekolah yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan antara lain:

1. Visi dan Misi Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan;
2. Kebijakan Sekolah dalam mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup;
3. Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pendidikan maupun tenaga kependidikan di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup;
4. Kebijakan Sekolah dalam hal penghematan sumber daya alam;
5. Kebijakan Sekolah yang mendukung terciptanya Lingkungan Sekolah yang Bersih dan Sehat; dan
6. Kebijakan Sekolah untuk pengalokasian dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Pembentukan kebijakan tersebut, melibatkan beberapa pihak, baik dari sekolah utamanya guru, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, dan komite sekolah. Selanjutnya agar dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh semua pihak, dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang ada disekolah.

Kebijakan Adiwiyata

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009: 1): tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata mengenai pengembangan kebijakan sekolah yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Dengan ditetapkan peraturan oleh kementerian tersebut tentunya pemerintah juga mengharapkan program adiwiyata ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan mampu menjadikan sekolah sebagai sekolah peduli lingkungan dan terciptanya sekolah yang bersih dan sehat. Kemudian, pembentukan kebijakan terkait lingkungan hidup harus melibatkan komponen yang berperan sebagai akademisi yang mampu mendorong terwujudnya program adiwiyata.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, (2017: 205) penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Kedua masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperkuat atau memperdalam masalah yang telah disiapkan, dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Ketiga masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah.

Penelitian ini dilakukan di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Fokus penelitian ini adalah Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan lingkungan hidup dalam

pelaksanaan program adiwiyata yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Singkep. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dan adapun informan yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini yaitu: Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep, Wakil Kepala Sekolah (Kulikulum) dan Ketua Tim Adiwiyata SMA Negeri 1 Singkep, Guru SMA Negeri 1 Singkep, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dan Siswa SMA Negeri 1 Singkep. Dalam penelitian ini terdapat langkah-langkah dalam melakukan analisis data, yaitu :

- a. Reduksi Data, reduksi data merupakan bagian dari analisis dan di artikan sebagai proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian, dan trasnsformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan.
- b. Penyajian Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (dalam Ulber Silalahi, 2009: 340). Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan.
- c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi, Kesimpulan dilakukan saat penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi dilakukan saat memikirkan kembali yang terlintas dalam pikiran dan melakukan analisis dengan waktu yang singkat (Ulber Silalahi, 2009).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Sebagaimana dengan penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh. Data yang dimaksud ini adalah berupa wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian. Dalam rangka pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam program adiwiyata ini. Dengan hal ini program adiwiyata merupakan adalah salah satu bentuk peduli lingkungan.program ini merupakan program pendidikan lingkungan hidup. Dimana dalam pelaksanaan pendidikam lingkungan hidup ini melalui program adiwiyat akan membentuk pendidikan berupa kepedulian lingkungan yang dapat membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan.

Program adiwiyata ini akan memberikan peluang pendidikan yang lebih baik dalam mengakses pembelajaran dengan lingkungan yang sehat,bersih dan menjadikan sekolah yang layak. Dalam menerapkan sekolah yang berwawasan lingkungan melalui program adiwiyata ini sekolah melibatkan semua warga yang ada di sekolah. Dalam penelitian ini evaluasi dapat dilakukan dengan tujuan agar hasilnya memberikan berbaikan dalam melaksanakan

kebijakan. Sehingga pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup melalui program adiwiyata ini diharapkan akan membawa perubahan. Perubahan dapat dilihat pada pemanfaatan penerima sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan dari program adiwiyata.

2. Pembahasan

Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata merupakan salah satu program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter peduli dan berbudaya lingkungan sejak dini. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan dan pengevaluasian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam melakukan melaksanakan Pendidikan Lingkungan hidup ini tentunya ada standar yang digunakan dalam pengevaluasian pelaksanaan Adiwiyata. Hal ini dapat dilihat dari indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu, efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektifitas

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep ini masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kebijakan masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Dilihat dari standar kebijakan yang telah ditetapkan, pada Standar Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singkep sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari visi misi sekolah yang memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi pada pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup melalui mata pelajaran wajib dan/ atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar yang ditetapkan sesuai standar kebijakan tidak berjalan. Hal ini dikarenakan saat wawancara dengan siswa sekolah mereka menjelaskan bahwa mereka tidak pernah belajar mata pelajaran yang memenuhi standar kebijakan. Sehingga pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini belum efektif.

2. Efisiensi

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep ini masih belum efisien. Hal ini dikarenakan standar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sudah

berjalan tetapi tidak memenuhi standar kebijakan yang ditetapkan. Selain itu tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga mempengaruhi pelaksanaan. Kemudian dapat dilihat dari rencana kegiatan sudah berjalan, tetapi tenaga yang dibutuhkan dalam melaksanakan program masih kurang, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi kebutuhan, peran masyarakat belum optimal, dan peningkatan mutu pendidikan yang tidak sesuai dengan standar kebijakan. Sehingga pada indikator efisiensi masih jauh dari standar kebijakan yang diharapkan pemerintah dan pelaksanaannya juga tidak efisien.

3. Kecukupan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep ini masih belum cukup. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya memiliki kendala, dikarenakan tidak adanya anggaran yang diberikan untuk melaksanakan program, sehingga pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini tidak memenuhi kebutuhan pelaksanaan sehingga membuat pelaksanaannya tidak cukup. Akan tetapi meskipun tidak adanya anggaran sekolah tetap melaksanakan program adiwiyata. Dari hasil lapangan banyak kekurangan dalam melaksanakan program ini sehingga tidak memenuhi indikator kecukupan, dari segi kebersihan, dan perawatan sekolah hingga pada proses pembelajarannya yang tidak memuat pendidikan lingkungan hidup. Pada indikator kecukupan kondisi sekolah saat ini tidak sesuai pada standar kebijakan dalam kesediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan.

4. Pemerataan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep ini masih belum merata. Dikarenakan masih adanya pelaksanaan kebijakan yang belum merata, dari segi pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakannya. Baik dari pendistribusian dalam program adiwiyata yang belum merata, dikarenakan tidak adanya anggaran, dan pemberian tugas pada warga sekolah yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.

5. Responsivitas

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep ini masih pada indikator responsivitas masih belum memenuhi standar kebijakan. Sekolah yang seharusnya menerapkan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, akan tetapi tidak melaksanakan hal tersebut sesuai standar kebijakan, sehingga berpengaruh pada responsivitas dalam

pelaksanaannya. Terutama respon dari siswa itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketika sekolah tidak menerapkan standar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini tidak akan berjalan dengan optimal. Sehingga siswa tidak merasakan secara langsung manfaatnya. Dikarenakan siswa sendiri tidak tahu atau minim pengetahuan mengenai pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi peneliti mengharapkan bahwa adanya sosialisasi atau adanya pembelajaran menggunakan metode yang sudah dijadikan sebagai standar kebijakan.

6. Ketepatan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep ini sudah tepat sasaran, hal ini dikarenakan sekolah yang diperiksa adalah sekolah yang mendaftarkan diri sebagai sekolah adiwiyata. Dari peninjauan yang dilakukan oleh dinas sampai pada penilaian sudah dilaksanakan, dan sudah memenuhi syarat. Dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini sangat tepat dilaksanakan. Karena pada hakikatnya perlunya pendidikan lingkungan hidup guna memberikan pengaruh baik dalam pendidikan karakter, sehingga menciptakan jiwa peduli lingkungan yang semakin hari semakin mengalami kemajuan dan pengembangan pendidikan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup ini melalui program adiwiyata di SMA Negeri 1 Singkep secara umum sudah mampu mendorong terjadinya suatu bentuk perubahan pada pendidikan siswa dan lingkungan sekolah menjadi bermanfaat. Perubahan-perubahan ini mendukung dengan adanya kewajiban yang telah diberikan kepada masyarakat sekolah dan dinas terkait. Hasil Evaluasi Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Singkep didasarkan pada 6 indikator evaluasi yang secara tepat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada indikator efektivitas, dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep belum berjalan dengan efektif. Dikarenakan pelaksanaan program belum memenuhi standar kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga mempengaruhi pelaksanaannya. Meskipun ada kategori yang memenuhi standar, tetapi ketika masih ada yang tidak terlaksana maka pelaksanaan dikatakan belum efektif.

- b. Pada Indikator efisiensi, pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singkep belum efisien. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program adiwiyata. Dari tujuan dan target yang dilaksanakan masih sangat jauh dari pencapaiannya, sehingga tidak memenuhi standar kebijakan.
- c. Pada indikator kecukupan, pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep masih memiliki kendala sehingga pelaksanaannya tidak memenuhi standar kebijakan. Hambatan tersebut dari segi bantuan dan tidak memahami tupoksi tugas masing-masing. Sehingga minum akan pelaksanaannya dari kata cukup.
- d. Pada indikator pemerataan, pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep masih belum merata, Dikarenakan masih adanya pelaksanaan kebijakan yang belum merata, dari segi pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakannya. Baik dari pendistribusian dalam program adiwiyata yang belum merata, dikarenakan tidak adanya anggaran, dan pemberian tugas pada warga sekolah yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.
- e. Pada indikator responsivitas, pelaksanaan Pendidikan Lingkungan hidup Dalam Program adiwiyata ini sangat baik, namun pada indikator responsivitas masih banyak siswa yang tidak mengetahui dan merespon baik dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga partisipasi masyarakat sangat minim dan memberikan saran pada siswa sulit untuk diterima oleh pengguna kebijakan.
- f. Pada indikator ketepatan, pada pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singkep sudah tepat sasaran. hal ini dikarenakan sekolah yang diperiksa adalah sekolah yang mendaftarkan diri sebagai sekolah adiwiyata. Dari peninjauan yang dilakukan oleh dinas sampai pada penilaian sudah dilaksanakan, dan sudah memenuhi syarat. Dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini sangat tepat dilaksanakan.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan mengenai Evaluasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep harus meningkatkan kembali pelaksanaan program yang menunjang adiwiyata yang sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah saran-saran yang dimaksud dalam penelitian ini :

- a. Indikator Efektifitas, sebaiknya sekolah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian meningkatkan kembali kegiatan yang menunjang program adiwiyata. Sehingga Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Singkep bisa lebih efektif.
- b. Indikator Efisiensi, sebaiknya ada pengandaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Mengingat ini adalah bentuk kerjasama yang lebih baik antara pemberi kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hal ini akan menjadi pengaruh penting dalam menjalankan suatu kebijakan, karena ketika tidak adanya anggaran dan kerjasama akan mempengaruhi terlaksananya kebijakan.
- c. Indikator Kecukupan, sebaiknya dari sekolah sendiri lebih melakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan. Dan bagi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup agar lebih memperhatikan pelaksanaan program agar mencapai target kecukupan.
- d. Indikator Pemerataan, pada indikator ini diharapkan bahwa pelaksana kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup ini lebih meningkatkan pelaksanaan dari segi pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakannya. Baik dari pendistribusian dalam program adiwiyata yang belum merata, dikarenakan tidak adanya anggaran, sehingga pelaksanaannya merata.
- e. Indikator Responsivitas, pada indikator ini diharapkan bahwa pengguna kebijakan agar lebih aktif dalam melaksanakan serta mengajak siswa untuk berperan aktif dalam melaksanakan program dan alangkah baiknya siswa memberikan respon positif yang lebih dalam berpartisipasi untuk melaksanakan kebijakan agar kebijakan bisa terus berlanjut dan berjalan sesuai kebutuhan.
- f. Indikator Ketepatan, pada indikator ini diharapkan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan standar kebijakannya dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga bisa terus berjalan dengan tepat dan sesuai harapan pemberi dan pelaksana kebijakan.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep, Guru SMA Negeri 1 Singkep, dan Siswa SMA Negeri 1 Singkep yang telah memberikan saya izin melakukan penelitian dan membantu serta telah memberikan banyak dukungan kepada saya dalam memperoleh data. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan kepada Bapak Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A selaku ketua pembimbing dan Bapak Agus Hendrayady, S. Sos., M. S.i selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, saran, serta motivasi kepada penulis dalam melakukan penyelesaian penelitian ini

G. TENTANG PENULIS

Penulis bernama Nazreen Banu lahir di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada 30 Desember 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dibesarkan oleh Bapak Muhammad Arsad (alm) dan Ibu Nila Kesumawaty. Peneliti memulai pendidikan di Taman Kanak- Kanak Bhayangkari Lingga (TK Kemala Bhayangkari) pada tahun 2004-2005. Kemudian Peneliti Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Singkep pada tahun 2005-2011. Setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Singkep pada tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Singkep pada tahun 2014-2017. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan lulus pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang berada di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau pada tahun 2017 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

H. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Suprpto, S. H., & Mohi, W. K. (2018). Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo). *Aristo*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- Daryanto. & Suprihatin, A. 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gava Media
- Nurhayati, E. (2015). Implementasi kurikulum berbasis lingkungan di sekolah adiwiyata: Studi kasus si SMP Negeri 16 Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2), 3.
- Ramdhani, R. B. (2017). Implementasi Program Adiwiyata Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah Di Smpn 3 Sukabumi. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 1(2), 265. <https://doi.org/10.17509/ijposs.v1i2.4711>
- Duun, William N. (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Silalahi, Ulber. (2009), *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sonny, A. Keraf, (2010), *Etika Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2013), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Ombak
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Program Pengelolaan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata